

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki abad XXI terlihat kenyataan bahwa globalisasi telah terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Abad ke-21 bahkan diyakini akan menjadi abad baru yang disebut era informasi-ekonomi (*digital-economic*) dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan elektronika (*electronic commerce*). Kondisi ini mengakibatkan adanya pergeseran paradigma strategi pembangunan bangsa-bangsa dari pembangunan industri menuju ke era informasi (*information age*). Globalisasi di bidang ekonomi telah menciptakan suatu lingkungan yang semakin kompetitif bagi setiap organisasi dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Pandangan luas tentang keunggulan kompetitif adalah suatu cara memanfaatkan sumber daya data dan informasi untuk mencapai nilai yang maksimum. Menyikapi perkembangan global, nasional, dan regional dewasa ini yang syarat dengan berbagai masalah, krisis dan ketidakpastian serta peluang, maka kebutuhan akan informasi yang akurat, cepat, lengkap, aman, dan mudah, sangat diperlukan bagi suatu organisasi dalam setiap proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Hadirnya keterbukaan informasi diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi termasuk pengelolaan sistem informasi, sistem komunikasi, dan sistem transaksi elektronik, yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Revolusi informasi yang terjadi telah mentransformasikan informasi dari sesuatu yang dianggap sebagai hasil samping kegiatan-kegiatan organisasi menjadi salah satu aset (kekayaan) yang sangat penting bagi daya saing dan kelanjutan suatu organisasi. Sumber daya informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi

suatu organisasi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut. Setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.¹

Informasi yang disertai dengan perkembangan teknologi pendukungnya menjadi wahana yang sangat penting dalam memasuki era masyarakat informasi dan keterbukaan dalam hidup dan kehidupan masyarakat dunia. Sehingga setiap orang tidak hanya menjadi anggota masyarakat suatu bangsa saja, akan tetapi tanpa disadari juga telah memasuki masyarakat global yang tidak mengenal wilayah. Informasi juga telah menjadi sumber daya penting secara strategis yang perlu dikelola dengan baik sebagaimana sumber daya yang lain dan komputer elektronik memungkinkan untuk memperoleh informasi tersebut secara lebih cepat dan akurat. Dasar pemikiran kenyataan di atas bahwa suatu organisasi tidak harus sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik yang lebih unggul, hal ini dikarenakan sumber daya konseptual yang unggul (data dan informasi) dapat digunakan sama baiknya dengan sumber daya fisik lainnya.²

Idealnya era informasi menjadi momentum bagi suatu organisasi untuk memaksimalkan potensi bagi organisasi yang membawa kepada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja yang lebih besar, serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas hasil kerja organisasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi

¹ Redaksi, "SIMNAS dan Good Governance", www.budiutomo79.wordpress.com, di unduh pada Rabu, 27 Februari 2008

² Edhy Sutanta, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), Hal. 99

penyelenggaraan pembangunan.³ Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan.

Dalam konteks ini fokus utama teknologi informasi melalui SIM adalah usaha untuk mengurangi rantai proses kerja, yakni melalui penghapusan secara besar-besaran beberapa tahap rantai kerja yang tidak memberikan nilai tambah atau delay diantara tahap proses kerja.⁴ Akan tetapi kenyataan di lapangan sering kali suatu organisasi menunjukkan ketidaktepatan pemanfaatan teknologi berbasis komputer, karena gagal dalam membangun SIM yang disebabkan karena :

1. Kurang struktur organisasi yang wajar
2. Kurangnya perencanaan yang memadai
3. Kurang personil yang handal
4. Kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan memotivasi seluruh personil yang terlibat.⁵

Sukses organisasi di mana pun, dewasa ini tergantung pada keberhasilan manajemen melaksanakan pekerjaannya, keberhasilan manajemen tergantung pada dukungan tersediannya informasi yang relevan, dan tersedianya informasi yang relevan bagi manajemen hanya dapat diperoleh melalui pengelolaan data yang tepat. Setiap pekerjaan dan kegiatan memerlukan data dan informasi, sebaliknya dengan adanya pekerjaan atau kegiatan akan menghasilkan data dan informasi baru. Sesuai dengan tingkat manajemennya masing-masing, mereka semakin menyadari bahwa dengan informasi yang bernilai tinggi dapat membuat keputusan dengan lebih cepat, tepat, dan benar. Demikian pentingnya data dan informasi bagi organisasi, sehingga kemajuan organisasi dan kemampuannya melayani masyarakat atau pelanggan tergantung pada tersedianya data dan

³ Redaksi, "Kebijakan Pengembangan E-gov di Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah", www.sulteng.go.id, di unduh pada Kamis, 14 Februari 2008.

⁴ Redaksi, "Konsep Sistem Informasi Manajemen", www.oktadymalik.multiply.com, di unduh pada Selasa, 29 Januari 2008.

⁵ Goerge M. Scott, *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

informasi.⁶ Oleh karena itu tujuan tersebut dapat dicapai secara maksimal, efektif, dan efisien, apabila mendapat dukungan manajemen yang tepat. Manajemen yang tepat hanya dapat bekerja dengan baik dan lancar bila mendapat dukungan informasi yang bernilai tinggi. Informasi yang bernilai tinggi adalah berasal dari data yang diolah sesuai dengan kebutuhan manajemen masing-masing unit kerja.

Pada tahap awal pendirian suatu organisasi, SIM masih dikelola secara manual. Sistem informasi secara manual merupakan pengelolaan data menjadi informasi yang dilakukan secara manual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun semakin besar organisasi disertai dengan semakin meningkatnya kompetisi, sistem informasi secara manual dirasakan kurang efektif untuk menghasilkan informasi yang benar-benar diperlukan secara cepat. Ketidakefisienan sistem yang ada memberikan indikasi adanya biaya pemrosesan yang melebihi manfaat yang diperoleh oleh suatu organisasi. Pengelolaan sistem informasi secara komputerisasi memberikan fasilitas pengolahan informasi dengan kecepatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara manual. Keunggulan lain pengolahan sistem informasi secara komputerisasi adanya peningkatan efisiensi, pengendalian operasi yang lebih ketat, biaya yang lebih rendah, meminimalisir kesalahan, meningkatkan perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Pengembangan SIM ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kinerja, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pejabat publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif. Selain itu pengembangan SIM canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketrampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari

⁶ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal. 8

informasi yang sangat bermanfaat.⁷ Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer yang dikerjakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi pada suatu sistem informasi pada dasarnya adalah bagaimana agar sistem informasi yang dirancang tersebut dapat mendukung secara optimal pada setiap unit dan sekaligus pada semua tingkat kegiatan manajemen. Bila dicermati organisasi pemerintah sering kali dinilai lemah dalam hal manajemen informasi bila dibandingkan dengan organisasi swasta. Lemah dalam hal memanfaatkan peranan sumber daya informasi sebagai salah satu elemen penting organisasi, artinya suatu organisasi tidak harus sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik oleh karena sumber daya konseptual (data dan informasi) dapat digunakan sama baiknya dengan sumber daya fisik lainnya. Berada dalam lingkungan yang dinamis, kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting. Informasi yang diperoleh setidaknya dijadikan kerangka acuan dalam proses penentuan kegiatan manajemen mulai dari proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan terasa jauh lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bila terdapat informasi yang cepat, akurat, dan lengkap.

Faktor lain pemicu belum maksimalnya penerapan sistem informasi manajemen adalah belum rapinya penintegrasian masing-masing unit, padahal bila ditinjau dari organisasi dipandang sebagai satu sistem, maka unit-unit merupakan subsistem-subsistem informasi yang saling bekerjasama anatarsubsistem atau di dalam subsistem. Seringkali ditemui organisasi pemerintah tidak memiliki sistem koordinasi pada masing-masing unit, sehingga tidak berdiri sebagai suatu sistem organisasi yang utuh. Sehingga berpengaruh pada belum maksimalnya perwujudan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Agar bermanfaat sebagai penunjang kegiatan organisasi, informasi yang dimiliki perlu diinterpretasikan dengan tepat. Salah satu faktor penentu pemanfaatan informasi ialah kaitan informasi yang dimiliki dengan proses

⁷ Redaksi, "Konsep Sistem Informasi Manajemen", www.oktadymalik.multiply.com, di unduh pada Selasa, 29 Januari 2008.

pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu⁸ :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Untuk itu disadari bahwa setiap lembaga pemerintah memiliki berbagai jenis informasi yang saling terkait. Strategi pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan setiap lembaga pemerintah. Sehingga sasaran yang menjadi prioritasnya adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Menyadari pentingnya suatu sistem informasi yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, Departemen Luar Negeri pun berusaha untuk mengoptimalkan penerapan SIM dalam mendukung proses pengambilan suatu kebijakan. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 56 tahun 2005 tentang penyelenggaraan sistem informasi pada Departemen Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang demokratis yakni melalui birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Departemen Luar Negeri yang berslogan **“Melalui Diplomasi Total, Ikut Mewujudkan Indonesia Yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis, dan Sejahtera”** adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan hubungan diplomatik luar negeri. Departemen Luar Negeri yang berkantor pusat di Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat merupakan salah satu departemen yang berdiri setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perkembangannya tugas utama Departemen Luar Negeri tidak hanya menangani perjuangan diplomatik bangsa Indonesia dalam mencapai pengakuan yuridis sebagai negara yang berdaulat, namun

⁸ Redaksi, “Pengembangan software sistem aplikasi Electronic Government (e-gov) pemerintah daerah”, *www.rapidsoft-international.com*, di unduh pada Kamis, 14 Februari 2008.

berkembang menjadi tugas seperti yang telah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut menjaga ketertiban dunia. Dengan arah seperti itu, Departemen Luar Negeri menjalankan diplomasi yang berisi, tentunya dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia.

Dalam mendukung pernyataan tersebut, Departemen Luar Negeri membutuhkan kelembagaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri serta merumuskan kebijakan dalam rangka memproyeksi tindakan dan sikap RI dalam menghadapi berbagai masalah luar negeri dan hubungan antar bangsa berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Untuk itu berlandaskan pada SK Menlu No. 02A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 per tanggal 19 Agustus 2005, kelembagaan yang dimaksud dalam rangka melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri dimandatkan kepada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BBPK) Departemen Luar Negeri. Maka atas dasar demikian, maka BPPK melakukan tugas penelitian dan pengembangan kebijakan. Output yang dihasilkan berupa *policy planning* dan *policy review* yang akan direkomendasikan kepada Departemen Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sebagai pengambil kebijakan. Mencermati hal tersebut tentunya kebutuhan akan informasi yang *up to date* semakin dibutuhkan terlebih dalam petentuan kebijakan luar negeri. Maka dari itu semua diperlukan suatu SIM yang terintegrasi dalam memberikan masukan pada proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan akan sangat terkait dengan kondisi lingkungan dimana sistem itu berada, dimana dalam hal perumusan kebijakan luar negeri perolehan informasi tentunya juga berasal dari luar lingkungan suatu negara. Bagi Departemen Luar Negeri sendiri SIM ini akan sangat membantu dalam merumuskan setiap kebijakan. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang akan dihasilkan berdasar pada SIM di Departemen Luar Negeri dapat mengakomodasi nilai-nilai kepentingan bangsa Indonesia.

Dalam prakteknya pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM secara komputerisasi pada direktorat BPPK masih relatif baru, dimana pengembangannya masih terus dilakukan. Anggaran yang disediakan dalam daftar isian perencanaan anggaran (DIPA) untuk melakukan pengembangan aplikasi dari

SIM ini sekitar 200-300 juta, sedangkan untuk perlengkapan penyediaan infrastruktur terpisah dari anggaran tersebut yang sifatnya disesuaikan dengan usulan kebutuhan pada direktorat BPPK⁹. Pengembangan SIM yang dilakukan oleh direktorat BPPK belum dilakukan secara menyeluruh sebagai elemen yang saling bergantung satu sama lain, yang baru berfokus pada pembangunan infrastruktur berupa *hardware* dan *network*. Kondisi ini kemudian berdampak pada belum maksimalnya dalam proses transformasi pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM. penerapan SIM di BPPK sebagai subsistem dari SIM Departemen Luar Negeri secara keseluruhan masih terpisah belum menjadi satu sistem kesatuan yang besar. Dimana masing-masing bagian atau unit di direktorat BPPK mempunyai sistem informasi sendiri dan belum terhubung dengan sistem jaringan yang *on-line*, sehingga tiap-tiap bagian atau unit jika memerlukan informasi yang dibutuhkan dari unit lain adalah dengan membuat *hardcopy*. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kelambatan, ketidakakuratan, ketidaktepatan informasi yang dihasilkan, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang *up to date*.

Boleh jadi pengembangan SIM yang dilakukan pada direktorat BPPK sejak tahun 2005, idealnya sudah mampu menyediakan sistem informasi manajemen *database* yang terintegrasi dikelola oleh tenaga yang profesional. Hal ini berarti bahwa setidaknya sudah ada unit khusus pada direktorat BPPK yang mengelola dan mengolah informasi yang didukung oleh infrastruktur dan aplikasi yang memadai serta SDM yang *capable* dibidang IT. Namun sayangnya hal ini belum terlihat dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK, dimana pengembangan SIM yang dilakukan baru sebatas penyediaan infrastruktur berupa peremajaan *hardware* dan pembangunan *network* melalui LAN yang belum diikuti dengan pengembangan dari sisi *software* dan SDM. Hal ini berdampak pada pemanfaatan komputer yang ada dalam pengelolaan dan pengolahan informasi masih merupakan alat bantu yang berguna untuk mempercepat proses

⁹ Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Sekretariat BPPK Departemen Luar Negeri, pada Tanggal 23 Desember 2008, lihat kembali lampiran hasil wawancara.

maupun agar pekerjaan menjadi lebih rapi, dimana penggunaannya masih terbatas untuk menggantikan fungsi mesin ketik. Dalam prakteknya pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM pada Direktorat BPPK masih sebatas semi konvensional, satu sisi masih dikumpulkan dalam satu folder-folder surat sesuai dengan unit terkait dan disisi lain sebagian data tersebut sudah dimasukkan ke dalam *database*. Sehingga sering kali pejabat eselon 1 dan 2 kurang mendapat data yang komprehensif melalui *database* informasi, yang mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam merespon permasalahan isu aktual.

1.2 Pokok Permasalahan

Di atas kertas, perenapan SIM pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri dalam pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat akan mendukung kinerja peningkatan efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah. Rancangan yang dibuat memperlihatkan semangat mewujudkan peningkatan pengguna yang berbasis pengetahuan (*knowledge worker*), berorientasi pada manusia dan kepentingan umum dengan menekankan pada aspek kualitas fungsional, kualitas teknis, serta kualitas layanan. Kelak, apabila penerapan SIM pada Direktorat BPPK berbasis elektronik menjadi kenyataan, boleh jadi ia dapat mengurangi rantai proses kerja dalam struktur organisasi serta sebagai wadah dalam menampung gagasan dan solusi yang bersifat *bottom up*.

Peneliti melihat kenyataan di lapangan pengembangan SIM yang dilakukan pada Direktorat BPPK masih dilakukan secara manual, yakni hanya sebatas tahap pengklasifikasian informasi fisik yang masuk dengan tidak melalui penyimpanan elektronik *database* yang terintegrasi. Permasalahan yang timbul ialah dalam hal efisiensi waktu yang digunakan untuk mencari informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan pada level manajemen. Kenyataan di atas tentunya akan berpengaruh dalam proses pembangunan sumber daya manusia berbasis pengetahuan yang sulit diwujudkan bila belum tersedianya infrastruktur yang memadai berupa kelengkapan sumber daya *hardware*, *software*, data, dan *netwok* berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini

ditujukan untuk membahas penerapan SIM secara komprehensif dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BBPK) Departemen Luar Negeri.
2. Mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri.

1.4 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari manfaat secara akademis dan praktis, yakni :

- Manfaat akademis dari penulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK di Departemen Luar Negeri, kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penulisan.
- Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi para akademisi serta memberikan masukan kepada Departemen Luar Negeri direktorat BPPK dan kalangan masyarakat pada umumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari sejumlah konsep teori dan kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam membahas penelitian ini dan metodologi penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat.

Bab III Gambaran Umum tentang Obyek Penelitian.

Pada bab ini tidak hanya berisi profil dari bidang kelembagaan tetapi juga gambaran umum obyek penelitian, dan bagaimana analisis penerapan sistem informasi manajemen pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri.

Bab IV Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Direktorat Badan Kebijakan dan Pengembangan Luar Negeri.

Bab ini merupakan pendeskripsian serta analisis terkait dengan efektifitas pelaksanaan mekanisme sistem informasi manajemen khususnya pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri atas simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi terhadap hasil analisis. Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.